



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 5 TAHUN 2009





TENTANG

TATA CARA DAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan perjalanan dinas serta untuk menyesuaikan terjadinya perubahan harga yang mempengaruhi biaya hidup, biaya akomodasi, dan biaya transportasi, maka perlu dilakukan penyempurnaan tata cara dan biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2009.





- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 40 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA DAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2009.**





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Batam.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Batam.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Batam.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batam.
6. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
8. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan Kota Batam yang dilakukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama atas perintah Pejabat yang berwenang untuk mendukung kinerja SKPD khususnya dan Pemerintah Kota Batam umumnya.
9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukannya ke wilayah Kecamatan lainnya di Kota Batam.
10. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
11. Uang kontribusi adalah sebagian lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan dan atau biaya penginapan.
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
14. Tempat kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.
15. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

**BAB II
PERJALANAN DINAS**

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dimaksudkan untuk

memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan dalam lingkup SKPD-nya masing-masing.

- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan/atau perintah Pejabat yang berwenang.





Pasal 3

- (1) Berdasarkan tempat tujuan, perjalanan dinas terbagi atas:
- Perjalanan dinas luar daerah;
 - Perjalanan dinas dalam daerah.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbagi atas:
- Perjalanan dinas dalam negeri;
 - Perjalanan dinas luar negeri.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
- Perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan darat (mainland);
 - Perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan laut (hinterland).

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- Uang harian, yang meliputi: uang penginapan, uang makan, uang saku, dan transportasi lokal;
 - Biaya transportasi udara dan/atau transportasi laut.
- (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b, berupa uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal.
- (4) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
- Tingkat A untuk Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota) serta Pimpinan DPRD;
 - Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan Pegawai Golongan IV;
 - Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan Pegawai Golongan III;
 - Tingkat E untuk Pegawai Golongan II, Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap.
- (5) Besarnya biaya perjalanan dinas sesuai dengan tingkat penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampir dalam lampiran Peraturan ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran satuan kerja yang berkenaan.

Pasal 6

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 8


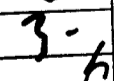
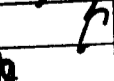

- (1) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan sesuai dengan jumlah hari yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut.
- (2) Jumlah hari yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung mulai dengan hari keberangkatan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju sampai dengan hari kembali ke tempat kedudukan semula.
- (3) Biaya transportasi udara atau laut yang diberikan dalam rangka perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf b, meliputi antara lain biaya tiket pesawat/kapal, airport/seaport tax, biaya fiskal dan biaya transportasi lokal (darat) dari pelabuhan udara/laut tempat tujuan ke tempat penginapan.

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diberikan kepada masing-masing pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, kecuali biaya perjalanan dinas dalam daerah hinterland sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan kepada tim.

Pasal 10

Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf e.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 12

Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional yang biaya penginapan pesertanya sudah termasuk dalam biaya kontribusi yang dibayarkan, maka uang harian yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a tidak termasuk biaya penginapan.

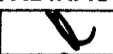
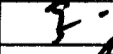
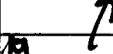

**BAB IV
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD sebagai berikut :
 - a. Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib yang ada;
 - c. Sekretaris DPRD ditandatangani dan dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD;
 - d. Selain Sekretaris DPRD, Pejabat Eselon II dan Kepala Kantor ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan sepengetahuan Walikota atau Wakil Walikota;
 - e. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten;
 - f. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Sekwan/ Sekretaris Korpri;
 - g. Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada Kantor ditandatangani oleh Kepala Kantor.

Pasal 14

Selain Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah dan persetujuan pejabat yang berwenang dengan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) menurut tingkat pendidikan dan kepatutan tugas yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 15

Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.

Pasal 16

- (1) Pejabat Negara, PNS & PTT yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Wakil Walikota.
- (2) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) huruf b dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang telah melakukan perjalanan dinas, SPPD-nya harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) PNS yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas sebagai pendukung pertanggung jawaban.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD.
- (3) Kelengkapan pertanggungjawaban dalam perjalanan dinas, yaitu:
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT);
 - b. SPPD yang telah ditandatangani dan disahkan oleh pejabat yang berwenang pada tempat tujuan;
 - c. Laporan perjalanan dinas.

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	✓
KA. _____	✓
KABAG. _____	✓

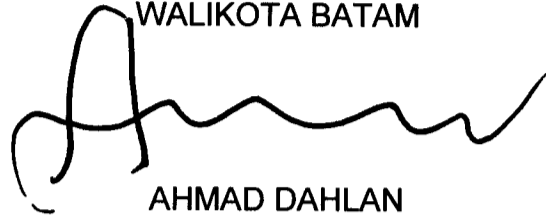
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 Februari 2009

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 27 Februari 2009

Sekretaris Daerah Kota Batam



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
Nip.19530303 197803 1 019

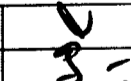
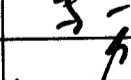
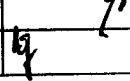

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 80

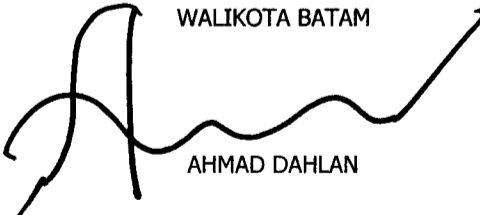
PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	3 -
KA. _____	↑
KABAG. _____	4

1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM NEGERI

1) PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN DPRD (TINGKAT A)

NO	PROPINSI	LUMPSUM				TOTAL
		UANG PENGINAPAN	UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL	
1	Nangroe Aceh Darusalam	850,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,450,000.00
2	Sumatera Utara	850,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,450,000.00
3	Riau	850,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,450,000.00
4	Kepulauan Riau	850,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,450,000.00
5	Jambi	850,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,450,000.00
6	Sumatera Barat	850,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,450,000.00
7	Sumatera Selatan	850,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,450,000.00
8	Lampung	850,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,450,000.00
9	Bengkulu	850,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,450,000.00
10	Bangka Belitung	850,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,450,000.00
11	Banten	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,600,000.00
12	DKI Jakarta	1,500,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,100,000.00
13	Jawa Barat	1,100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,700,000.00
14	Jawa Tengah	1,100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,700,000.00
15	D.I. Yogyakarta	1,100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,700,000.00
16	Jawa Timur	1,100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,700,000.00
17	Bali	1,800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,400,000.00
18	Nusa Tenggara Barat	900,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,500,000.00
19	Nusa Tenggara Timur	900,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,500,000.00
20	Kalimantan Barat	900,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,500,000.00
21	Kalimantan Tengah	1,050,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,500,000.00
22	Kalimantan Selatan	1,050,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,500,000.00
23	Kalimantan Timur	1,050,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,500,000.00
24	Sulawesi Utara	1,050,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,500,000.00
25	Sulawesi Barat	1,050,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,500,000.00
26	Sulawesi Selatan	1,050,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,500,000.00
27	Sulawesi Tengah	1,050,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,500,000.00
28	Sulawesi Tenggara	1,050,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,500,000.00
29	Maluku	1,050,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,500,000.00
30	Maluku Utara	1,050,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,500,000.00
31	Papua	1,050,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,500,000.00
32	Irian Jaya Barat	1,050,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,500,000.00
33	Gorontalo	1,050,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,500,000.00

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

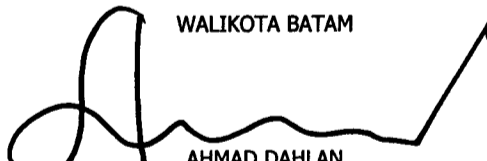
WALIKOTA BATAM

 AHMAD DAHLAN

1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM NEGERI





2) PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD (TINGKAT B)

NO	PROPINSI	LUMPSUM				TOTAL
		UANG PENGINAPAN	UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL	
1	Nangroe Aceh Darusalam	550,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,000,000.00
2	Sumatera Utara	550,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,000,000.00
3	Riau	550,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,000,000.00
4	Kepulauan Riau	300,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	750,000.00
5	Jambi	550,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,000,000.00
6	Sumatera Barat	550,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,000,000.00
7	Sumatera Selatan	550,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,000,000.00
8	Lampung	550,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,000,000.00
9	Bengkulu	550,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,000,000.00
10	Bangka Belitung	550,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,000,000.00
11	Banten	700,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,150,000.00
12	DKI Jakarta	700,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,150,000.00
13	Jawa Barat	700,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,150,000.00
14	Jawa Tengah	700,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,150,000.00
15	D.I. Yogyakarta	700,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,150,000.00
16	Jawa Timur	700,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,150,000.00
17	Bali	1,200,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,650,000.00
18	Nusa Tenggara Barat	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
19	Nusa Tenggara Timur	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
20	Kalimantan Barat	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
21	Kalimantan Tengah	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
22	Kalimantan Selatan	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
23	Kalimantan Timur	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
24	Sulawesi Utara	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
25	Sulawesi Barat	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
26	Sulawesi Selatan	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
27	Sulawesi Tengah	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
28	Sulawesi Tenggara	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
29	Maluku	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
30	Maluku Utara	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
31	Papua	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
32	Irian Jaya Barat	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
33	Gorontalo	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

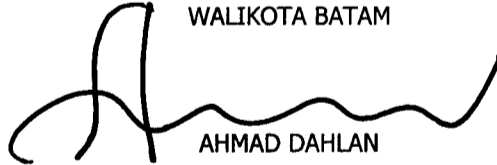
PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM NEGERI





3) PEJABAT ESELON III DAN PEGAWAI NON ESELON GOL.IV (TINGKAT C)

NO	PROPINSI	LUMPΣUM				TOTAL
		UANG PENGINAPAN	UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL	
1	Nangroe Aceh Darusalam	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	900,000.00
2	Sumatera Utara	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	900,000.00
3	Riau	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	900,000.00
4	Kepulauan Riau	250,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	700,000.00
5	Jambi	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	900,000.00
6	Sumatera Barat	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	900,000.00
7	Sumatera Selatan	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	900,000.00
8	Lampung	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	900,000.00
9	Bengkulu	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	900,000.00
10	Bangka Belitung	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	900,000.00
11	Banten	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
12	DKI Jakarta	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
13	Jawa Barat	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
14	Jawa Tengah	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
15	D.I. Yogyakarta	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
16	Jawa Timur	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,050,000.00
17	Bali	1,050,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,500,000.00
18	Nusa Tenggara Barat	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	950,000.00
19	Nusa Tenggara Timur	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	950,000.00
20	Kalimantan Barat	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	950,000.00
21	Kalimantan Tengah	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	950,000.00
22	Kalimantan Selatan	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	950,000.00
23	Kalimantan Timur	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	950,000.00
24	Sulawesi Utara	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	950,000.00
25	Sulawesi Barat	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	950,000.00
26	Sulawesi Selatan	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	950,000.00
27	Sulawesi Tengah	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	950,000.00
28	Sulawesi Tenggara	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	950,000.00
29	Maluku	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	950,000.00
30	Maluku Utara	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	950,000.00
31	Papua	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	950,000.00
32	Irian Jaya Barat	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	950,000.00
33	Gorontalo	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	950,000.00

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

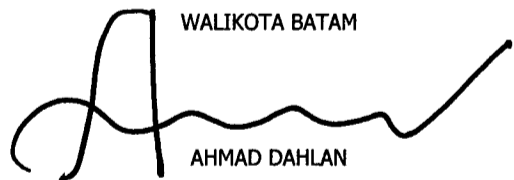
PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM NEGERI





4) PEJABAT ESELON IV DAN PEGAWAI NON ESELON GOL. III (TINGKAT D)

NO	PROPINSI	LUMPSUM				TOTAL
		UANG PENGINAPAN	UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL	
1	Nangroe Aceh Darusalam	425,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	800,000.00
2	Sumatera Utara	425,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	800,000.00
3	Riau	425,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	800,000.00
4	Kepulauan Riau	225,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	600,000.00
5	Jambi	425,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	800,000.00
6	Sumatera Barat	425,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	800,000.00
7	Sumatera Selatan	425,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	800,000.00
8	Lampung	425,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	800,000.00
9	Bengkulu	425,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	800,000.00
10	Bangka Belitung	425,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	800,000.00
11	Banten	525,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	900,000.00
12	DKI Jakarta	525,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	900,000.00
13	Jawa Barat	525,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	900,000.00
14	Jawa Tengah	525,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	900,000.00
15	D.I. Yogyakarta	525,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	900,000.00
16	Jawa Timur	525,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	900,000.00
17	Bali	925,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1,300,000.00
18	Nusa Tenggara Barat	475,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	850,000.00
19	Nusa Tenggara Timur	475,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	850,000.00
20	Kalimantan Barat	475,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	850,000.00
21	Kalimantan Tengah	475,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	850,000.00
22	Kalimantan Selatan	475,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	850,000.00
23	Kalimantan Timur	475,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	850,000.00
24	Sulawesi Utara	475,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	850,000.00
25	Sulawesi Barat	475,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	850,000.00
26	Sulawesi Selatan	475,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	850,000.00
27	Sulawesi Tengah	475,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	850,000.00
28	Sulawesi Tenggara	475,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	850,000.00
29	Maluku	475,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	850,000.00
30	Maluku Utara	475,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	850,000.00
31	Papua	475,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	850,000.00
32	Irian Jaya Barat	475,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	850,000.00
33	Gorontalo	475,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	850,000.00

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

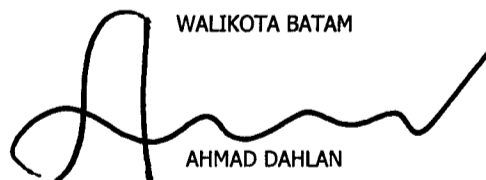
PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM NEGERI





5) PEGAWAI GOL. II, GOL.I DAN PTT (TINGKAT E)

NO	PROPINSI	LUMPSUM				TOTAL
		UANG PENGINAPAN	UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL	
1	Nangroe Aceh Darusalam	200,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	400,000.00
2	Sumatera Utara	200,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	400,000.00
3	Riau	200,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	400,000.00
4	Kepulauan Riau	200,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	400,000.00
5	Jambi	200,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	400,000.00
6	Sumatera Barat	200,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	400,000.00
7	Sumatera Selatan	200,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	400,000.00
8	Lampung	200,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	400,000.00
9	Bengkulu	200,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	400,000.00
10	Bangka Belitung	200,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	400,000.00
11	Banten	300,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	500,000.00
12	DKI Jakarta	300,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	500,000.00
13	Jawa Barat	300,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	500,000.00
14	Jawa Tengah	300,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	500,000.00
15	D.I. Yogyakarta	300,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	500,000.00
16	Jawa Timur	300,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	500,000.00
17	Bali	300,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	500,000.00
18	Nusa Tenggara Barat	250,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	450,000.00
19	Nusa Tenggara Timur	250,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	450,000.00
20	Kalimantan Barat	250,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	450,000.00
21	Kalimantan Tengah	250,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	450,000.00
22	Kalimantan Selatan	250,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	450,000.00
23	Kalimantan Timur	250,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	450,000.00
24	Sulawesi Utara	250,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	450,000.00
25	Sulawesi Barat	250,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	450,000.00
26	Sulawesi Selatan	250,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	450,000.00
27	Sulawesi Tengah	250,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	450,000.00
28	Sulawesi Tenggara	250,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	450,000.00
29	Maluku	250,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	450,000.00
30	Maluku Utara	250,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	450,000.00
31	Papua	250,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	450,000.00
32	Irian Jaya Barat	250,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	450,000.00
33	Gorontalo	250,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	450,000.00

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

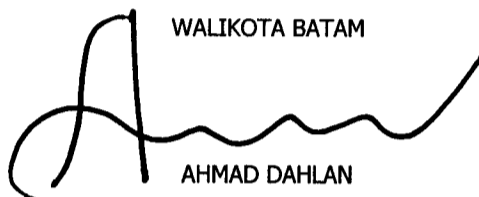
PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR NEGERI





1) PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN DPRD (TINGKAT A)

NO	WILAYAH	LUMPSUM				TOTAL
		UANG PENGINAPAN	UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL	
1	Amerika Utara	4,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	5,500,000.00
2	Amerika Selatan	3,500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	5,000,000.00
3	Eropa Barat	4,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	5,500,000.00
4	Eropa Timur	3,500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	5,000,000.00
5	Afrika	3,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	4,500,000.00
6	Timur Tengah	3,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	4,500,000.00
7	Asia Tengah	3,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	4,500,000.00
8	Asia Timur	3,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	4,500,000.00
9	Asia Tenggara	2,500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	4,000,000.00
10	Asia Pasifik	3,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	4,500,000.00

WALIKOTA BATAM



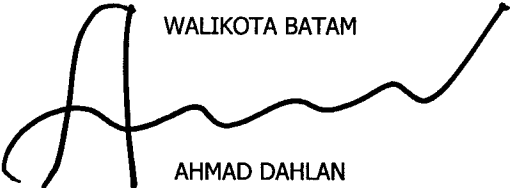
AHMAD DAHLAN





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR NEGERI

2) PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD (TINGKAT B)

NO	WILAYAH	LUMPUSUM				TOTAL
		UANG PENGINAPAN	UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL	
1	Amerika Utara	3,800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	5,000,000.00
2	Amerika Selatan	3,300,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	4,500,000.00
3	Eropa Barat	3,800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	5,000,000.00
4	Eropa Timur	3,300,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	4,500,000.00
5	Afrika	2,800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	4,000,000.00
6	Timur Tengah	2,800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	4,000,000.00
7	Asia Tengah	2,800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	4,000,000.00
8	Asia Timur	2,800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	4,000,000.00
9	Asia Tenggara	2,300,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	3,500,000.00
10	Asia Pasifik	2,800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	4,000,000.00

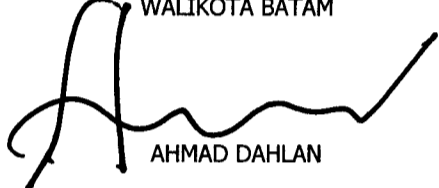
WALIKOTA BATAM

 AHMAD DAHLAN





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR NEGERI

3) PEJABAT ESELON III DAN PEGAWAI NON ESELON GOL.IV (TINGKAT C)

NO	WILAYAH	LUMPSUM				TOTAL
		UANG PENGINAPAN	UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL	
1	Amerika Utara	3,850,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	4,750,000.00
2	Amerika Selatan	3,350,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	4,250,000.00
3	Eropa Barat	3,850,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	4,750,000.00
4	Eropa Timur	3,350,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	4,250,000.00
5	Afrika	2,850,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,750,000.00
6	Timur Tengah	2,850,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,750,000.00
7	Asia Tengah	2,850,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,750,000.00
8	Asia Timur	2,850,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,750,000.00
9	Asia Tenggara	2,350,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,250,000.00
10	Asia Pasifik	2,850,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,750,000.00

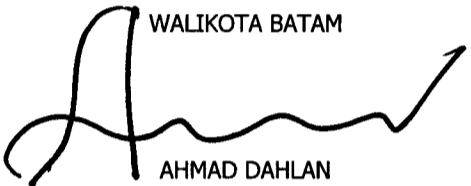
WALIKOTA BATAM

 AHMAD DAHLAN





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR NEGERI

4) PEJABAT ESELON IV DAN PEGAWAI NON ESELON GOL. III (TINGKAT D)

NO	WILAYAH	LUMPSUM				TOTAL
		UANG PENGINAPAN	UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL	
1	Amerika Utara	3,600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	4,500,000.00
2	Amerika Selatan	3,100,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00
3	Eropa Barat	3,600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Eropa Timur	3,100,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00
5	Afrika	2,600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,500,000.00
6	Timur Tengah	2,600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,500,000.00
7	Asia Tengah	2,600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,500,000.00
8	Asia Timur	2,600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,500,000.00
9	Asia Tenggara	2,100,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,000,000.00
10	Asia Pasifik	2,600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,500,000.00

WALIKOTA BATAM

 AHMAD DAHLAN

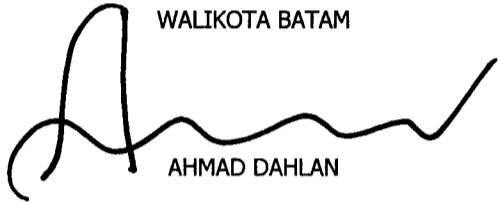
PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR NEGERI





5) PEGAWAI GOL. II, GOL.I DAN PTT (TINGKAT E)

NO	WILAYAH	LUMPSUM				TOTAL
		UANG PENGINAPAN	UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL	
1	Amerika Utara	2,900,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	3,500,000.00
2	Amerika Selatan	2,400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	3,000,000.00
3	Eropa Barat	2,900,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	3,500,000.00
4	Eropa Timur	2,400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	3,000,000.00
5	Afrika	1,900,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,500,000.00
6	Timur Tengah	1,900,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,500,000.00
7	Asia Tengah	1,900,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,500,000.00
8	Asia Timur	1,900,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,500,000.00
9	Asia Tenggara	1,400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,000,000.00
10	Asia Pasifik	1,900,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,500,000.00

WALIKOTA BATAM



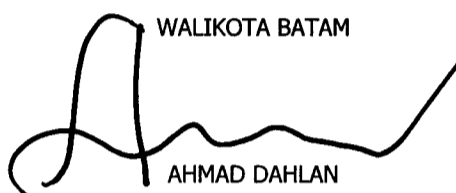
AHMAD DAHLAN





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

3. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KECAMATAN DARAT

1) PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN DPRD (TINGKAT A)

NO	KECAMATAN	LUMPSUM				TOTAL
		UANG PENGINAPAN	UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL	
1	Lubuk Baja	-	75,000.00	-	-	75,000.00
2	Sekupang	-	75,000.00	-	-	75,000.00
3	Sagulung	-	75,000.00	-	-	75,000.00
4	Batu Aji	-	75,000.00	-	-	75,000.00
5	Sei Beduk	-	75,000.00	-	-	75,000.00
6	Batu Ampar	-	75,000.00	-	-	75,000.00
7	Nongsa	-	75,000.00	-	-	75,000.00
8	Bengkong	-	75,000.00	-	-	75,000.00
9	Batam Kota	-	75,000.00	-	-	75,000.00

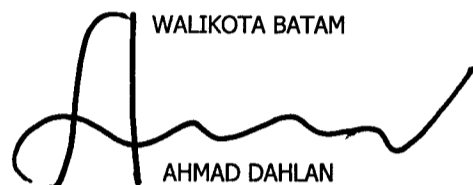
WALIKOTA BATAM

 AHMAD DAHLAN

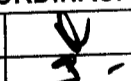
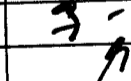
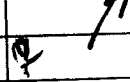

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

3. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KECAMATAN DARAT

2) PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD (TINGKAT B)

NO	KECAMATAN	LUMPSUM				TOTAL
		UANG PENGINAPAN	UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL	
1	Lubuk Baja	-	65,000.00	-	-	65,000.00
2	Sekupang	-	65,000.00	-	-	65,000.00
3	Sagulung	-	65,000.00	-	-	65,000.00
4	Batu Aji	-	65,000.00	-	-	65,000.00
5	Sei Beduk	-	65,000.00	-	-	65,000.00
6	Batu Ampar	-	65,000.00	-	-	65,000.00
7	Nongsa	-	65,000.00	-	-	65,000.00
8	Bengkong	-	65,000.00	-	-	65,000.00
9	Batam Kota	-	65,000.00	-	-	65,000.00

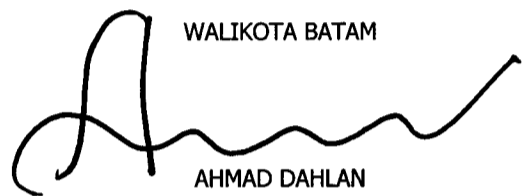
WALIKOTA BATAM

 AHMAD DAHLAN

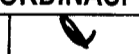
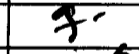
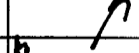

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

3. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KECAMATAN DARAT

3) PEJABAT ESELON III DAN PEGAWAI NON ESELON GOL.IV (TINGKAT C)

NO	KECAMATAN	LUMPSUM				TOTAL
		UANG PENGINAPAN	UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL	
1	Lubuk Baja	-	55,000.00	-	-	55,000.00
2	Sekupang	-	55,000.00	-	-	55,000.00
3	Sagulung	-	55,000.00	-	-	55,000.00
4	Batu Aji	-	55,000.00	-	-	55,000.00
5	Sei Beduk	-	55,000.00	-	-	55,000.00
6	Batu Ampar	-	55,000.00	-	-	55,000.00
7	Nongsa	-	55,000.00	-	-	55,000.00
8	Bengkong	-	55,000.00	-	-	55,000.00
9	Batam Kota	-	55,000.00	-	-	55,000.00

WALIKOTA BATAM

 AHMAD DAHLAN

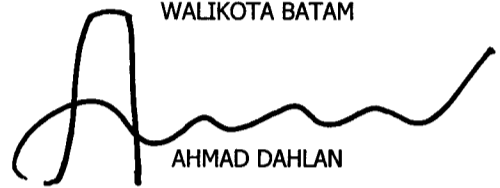
PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

3. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KECAMATAN DARAT

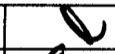
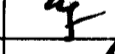

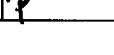
4) PEJABAT ESELON IV DAN PEGAWAI NON ESELON GOL. III (TINGKAT D)

NO	KECAMATAN	LUMPSUM				TOTAL
		UANG PENGINAPAN	UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL	
1	Lubuk Baja	-	50,000.00	-	-	50,000.00
2	Sekupang	-	50,000.00	-	-	50,000.00
3	Sagulung	-	50,000.00	-	-	50,000.00
4	Batu Aji	-	50,000.00	-	-	50,000.00
5	Sei Beduk	-	50,000.00	-	-	50,000.00
6	Batu Ampar	-	50,000.00	-	-	50,000.00
7	Nongsa	-	50,000.00	-	-	50,000.00
8	Bengkong	-	50,000.00	-	-	50,000.00
9	Batam Kota	-	50,000.00	-	-	50,000.00

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

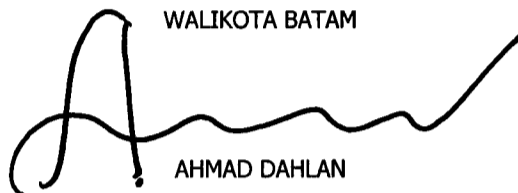
PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

3. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KECAMATAN DARAT





5) PEGAWAI GOL. II, GOL. I DAN PTT (TINGKAT E)

NO	KECAMATAN	LUMPSUM				TOTAL
		UANG PENGINAPAN	UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL	
1	Lubuk Baja	-	35,000.00	-	-	35,000.00
2	Sekupang	-	35,000.00	-	-	35,000.00
3	Sagulung	-	35,000.00	-	-	35,000.00
4	Batu Aji	-	35,000.00	-	-	35,000.00
5	Sei Beduk	-	35,000.00	-	-	35,000.00
6	Batu Ampar	-	35,000.00	-	-	35,000.00
7	Nongsa	-	35,000.00	-	-	35,000.00
8	Bengkong	-	35,000.00	-	-	35,000.00
9	Batam Kota	-	35,000.00	-	-	35,000.00

WALIKOTA BATAM



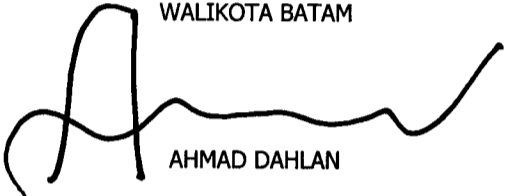
AHMAD DAHLAN





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

4. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KECAMATAN LAUT

1) PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN DPRD (TINGKAT A)

NO	KECAMATAN	LUMPSUM				TOTAL
		UANG PENGINAPAN	UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL	
1	Belakang Padang	-	75,000.00	55,000.00	-	130,000.00
2	Galang	-	75,000.00	55,000.00	-	130,000.00
3	Bulang	-	75,000.00	55,000.00	-	130,000.00

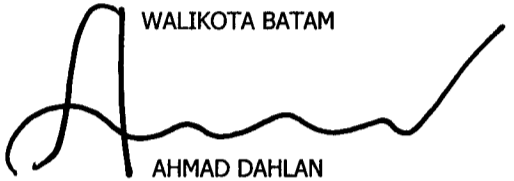
WALIKOTA BATAM

 AHMAD DAHLAN




PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

4. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KECAMATAN LAUT

2) PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD (TINGKAT B)

NO	KECAMATAN	LUMPSUM				TOTAL
		UANG PENGINAPAN	UANG MAKAN	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL	
1	Belakang Padang	-	65,000.00	55,000.00	-	120,000.00
2	Galang	-	65,000.00	55,000.00	-	120,000.00
3	Bulang	-	65,000.00	55,000.00	-	120,000.00

WALIKOTA BATAM

 AHMAD DAHLAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	